

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM DEMOKRATISASI

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DEMOCRATIZATION

Irwan Yulianto

Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: Irwan_yulianto@unars.ac.id

Abstrak Perkembangan TI sangat penting di media sosial. Jumlah pengguna internet meningkat drastis dari tahun 2013 hingga 2018. Melalui perkembangan tersebut, masyarakat khususnya generasi milenial dan gen Z tidak akan lepas dari teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, teknologi informasi telah menjadi sumber informasi utama. Pengabdian masyarakat melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam proses perubahan politik. Teknologi informasi kini diyakini mampu membuka jalan menuju demokrasi langsung dan menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. Partisipasi elektronik mengacu pada partisipasi warga negara dalam kegiatan demokrasi melalui sistem yang memanfaatkan ICT. Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, mempunyai hak suara dalam membuat peraturan dan program yang membentuk pemerintahan kita. Keberadaan partisipasi politik modern sebagian besar didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat disediakan oleh budaya demokrasi baru.

Kata Kunci: Suara Demokrasi, Teknologi Informasi, Partisipasi, Masyarakat.

Abstract IT development is particularly important in social media. The number of internet users increased dramatically from 2013 to 2018. Through these developments, people, especially millennials and gen Z, will not be separated from information technology. With the rapid development of technology, information technology has become the main source of information. Community service through a participatory action research (PAR) approach focuses on community empowerment. Because empowerment is always needed to meet the needs of the community and solve problems that exist in the community. The role of information technology in increasing political participation In fact, information technology plays an important role in the process of political change. Information technology is now believed to be able to pave the way to direct democracy and eliminate communication barriers in the democratization process. Electronic participation refers to the participation of citizens in democratic activities through systems that utilize ICT. Participatory democracy is about participation. Its goal is to ensure that all citizens, not just politicians, have a say in making the

rules and programs that shape our government. The existence of modern political participation is largely supported by the information and communication technologies that the new democratic culture can provide.

Keywords: *Voice of Democracy, Information Technology, Participation, Society*
Voice of Democracy, Information Technology, Participation, Society.

PENDAHULUAN

Perkembangan TI sangat penting terutama di media sosial. Tingkat pengguna internet dari 2013 hingga 2018 meningkat drastis. Dengan perkembangan tersebut masyarakat tidak pernah terlepas dengan teknologi informasi khususnya generasi milenial dan gen Z. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadikannya sebagai sumber informasi utama. Dalam sebuah system diperlukan adanya sebuah rancangan dan penerapan dalam sebuah penerapan mode Sistem Informasi untuk dapat dikembangkan (Pratama, *et., al.*, 2021).

Namun saat ini dalam hitungan detik saja, setiap lapisan masyarakat telah dapat mengakses berbagai informasi baik informasi nasional maupun informasi internasional. Selanjutnya adanya Upaya dapat meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pemilihan suatu partai politik (Ilmy, *et., al.*, 2021). Ini merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi di Indonesia sudah sangat pesat dan tersebar merata disetiap kalangan masyarakat, sehingga media elektronik menjadi informasi utama bagi masyarakat. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan di media elektronik mampu mempengaruhi pemikiran masyarakat. Setiap media memiliki daya tariknya masing – masing untuk mempengaruhi konsep pikir terhadap pemerintah. Namun disaat masyarakat tidak mampu memfilter informasi yang disampaikan melalui media, maka informasi yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya, tetapi Saat mereka dapat menyaring informasi yang ada maka itu berdampak baik dan membuat paham terhadap kondisi yang sebenarnya. Pentingnya pemanfaatan TI dalam komunikasi partisipasi politik dalam dunia informasi (Yusri, *et., al.*, 2021).

Masyarakat yang awalnya tidak peduli terhadap pemerintahan, kini menjadi tertarik dan kembali ikut serta peduli dengan perkembangan pemerintahan,

sehingga dapat meningkatkan jiwa demokratisnya kembali. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang peneliti peranan teknologi informasi untuk mewujudkan warga yang demokratis. Dengan demikian teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pun sebagai alat pendukung dalam proses demokrasi. Sehingga adanya peningkatan informasi untuk pentingnya teknologi tersebut (Situmeang, 2021). Syarat untuk itu terjadi terutama adalah keinginan yang tulus dari anggota masyarakat untuk mengambil tindakan demokratis, memiliki akses ke teknologi dan keterampilan untuk menggunakannya. Sistem TI yang mengandung fungsi dukungan komunikasi, jaringan manusia, efisiensi, keputusan politik, keputusan otoritas, pelayanan masyarakat, dan wawasan publik memiliki potensi besar untuk mendukung proses demokrasi di masyarakat manapun, terlepas dari arah politik pemerintahnya. (Lidén & Avdic, 2003).

METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 1. tahap persiapan, yaitu melakukan *survey* dan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat pelatihan, serta menetapkan sasaran dalam pelatihan. Pada tahap persiapan juga dilakukan mempersiapkan materi dan alat peraga untuk digunakan pada pelatihan. Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat agar masyarakat dapat menjadi aktor perubahan, bukan obyek pengabdian (Afandi, A. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Secara faktual teknologi informasi berperan penting dalam proses perubahan politik.

Terdapat keyakinan bahwa teknologi informasi dapat membuka jalan bagi demokrasi langsung sementara itu serta menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. Partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi melalui sistem berbasis TIK disebut e-partisipasi. Saat ini, itu adalah mungkin untuk menggunakan fasilitas digital untuk membuka jalan bagi partisipasi demokratis. Untuk mengukur partisipasi perlu diketahui berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan secara *online*.

Gibson (2005) menyebutkan beberapa contoh e-partisipasi seperti daftar pengiriman kartu pos elektronik atau lelucon politik, mengunduh perangkat lunak kampanye, meneruskan secara *online* petisi atau mendaftar untuk buletin e-news, dan lain-lain. E-partisipasi melibatkan perluasan dan transformasi partisipasi dalam masyarakat demokratis dan proses konsultatif yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Demokrasi dan proses politik formal pada dasarnya bergantung pada komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang terinformasi tentang isu-isu publik di antara warga negara, politisi, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin terpengaruh oleh keputusan kolektifnya (Sanford, & Rose, 2007).

E-partisipasi bertujuan untuk mencapai banyak tujuan seperti: menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung kewarganegaraan aktif, memungkinkan partisipasi yang lebih luas untuk mencapai khalayak yang lebih luas, dan memungkinkan kontribusi warga yang lebih terinformasi melalui penyediaan yang dapat diakses dan informasi yang dapat dipahami oleh target audiens (Al-Dalou, R., & Abu-Shanab, E, 2013). Dalam hal ini banyak penelitian juga telah dilakukan untuk membedakan apakah bentuk partisipasi digital baru ini (*e-participation*) benar-benar perluasan partisipasi konvensional atau jika mampu menghasilkan bentuk-bentuk partisipasi baru. Cantijoch dan Gibson [6] menyimpulkan bahwa partisipasi *online* tidak dapat dipahami sebagai suatu model yang baru dan independen tetapi menghubungkan dan memadukan dengan bentuk yang ada.

Di sisi lain, Saebo (2008) memperkenalkan dua bentuk partisipasi: bentuk pertama adalah partisipasi yang didorong oleh pemerintah, di mana partisipasi adalah tanggung jawab pemerintah dan juga terutama ditetapkan oleh pemerintah.

Yang kedua adalah partisipasi berbasis warga yang berarti bahwa adaptasi dan pengembangan teknologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi gerakan sosial yang dibuat oleh warga dan diaktifkan oleh jaringan. Selanjutnya studi yang dilakukann Nam (2011) tentang kesetaraan dalam partisipasi politik dan efek ganda dari internet tentang partisipasi politik menunjukkan bahwa internet, sampai batas tertentu, dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas partisipasi politik. Hal ini menunjukkan sifat teknologi internet mungkin memiliki potensi demokratis potensi untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas partisipatif. Kedua, internet tidak hanya memperkuat pola partisipasi politik offline yang ada, tetapi juga memobilisasi pola baru untuk partisipasi politik online. Ketiga, prediktor kuat untuk aktivitas politik online berbeda dari untuk aktivitas politik offline. penggunaan internet yang sering berkontribusi pada mobilisasi partisipasi baru oleh orang-orang tidak aktif offline, serta memperkuat partisipasi berkelanjutan oleh orang-orang aktif offline. Peserta tidak aktif offline akan secara aktif melibatkan diri dalam aktivitas politik online sebanding dengan frekuensi penggunaan internet. Teknologi informasi dipandang sebagai penyeimbang potensial peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan penindasan melalui kemampuan pendidikan, sosial, dan profesional mereka (Bastien, 2020).

Azis dan Hasna (2020) menemukan bahwa penggunaan internet secara signifikan dapat meningkatkan partisipasi politik. Kenyataan bahwa implementasi e-demokrasi di Indonesia masih menimbulkan dilema juga harus menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya, implementasi kebebasan berdemokrasi di internet di Indonesia masih memiliki masalah karena kebebasan internet di Indonesia dikategorikan sebagian gratis. Akhirnya, untuk membuat kebijakan e-demokrasi yang proporsional, negara harus membuat kebijakan e-demokrasi yang merangkul prinsip menciptakan ruang publik baru untuk interaksi dan musyawarah politik, menyediakan saluran komunikasi multi-arah interaktif, mengintegrasikan proses e-demokrasi dalam struktur dan pengembangan konstitusi yang lebih luas, memastikan interaksi antara warga negara dan perwakilan terpilih mereka dan

pemerintah adalah bermakna, memastikan ada cukup informasi online berkualitas tinggi, yang melibatkan upaya untuk merekrut suara publik seluas-luasnya ke dalam percakapan demokratis, dan mencerminkan realitas geografi dan sosial struktur di lingkungan secara *online*.

Polat (2005) meneliti hubungan antara antara tiga aspek Internet dan partisipasi politik. Dalam menganalisis internet sebagai sumber informasi, menjadi pendekatan untuk situasi pengetahuan yang sempurna di mana warga negara tahu semua tentang masalah kebijakan. Namun, hal ini mengasumsikan bahwa orang-orang yang tertarik untuk mendapatkan informasi tersebut harus memiliki akses dan keterampilan yang diperlukan untuk memproses informasi. Kedua, internet sebagai media komunikasi, menunjukkan bahwa internet meningkatkan kapasitas komunikasi di cara yang tidak setara dengan mendukung beberapa bentuk komunikasi lebih dari yang lain. Oleh karena itu, berbagai mode partisipasi politik terpengaruh secara asimetris dengan menggunakan internet. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih canggih dalam menyelidiki hubungan antara kapasitas komunikasi Internet dan partisipasi politik. Ketiga, dalam menganalisis potensi internet sebagai ruang publik virtual, memperluas ruang publik adalah terbatas karena distribusinya yang tidak merata, struktur yang sangat terfragmentasi dan peningkatan komersialisasi. Namun, ada banyak komunitas online yang anggotanya ikut serta dalam debat politik online. Meskipun mereka mungkin tidak membentuk ruang publik, komunitas online ini masih beroperasi sebagai platform di mana peserta melakukan hak-hak mereka sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam musyawarah politik online.

KESIMPULAN

Partisipatisipasi politik mengacu pada sesuatu yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Jika rakyat sendiri memberikan suara langsung pada kebijakan dan undang-undang, itu disebut demokrasi langsung. Jika mereka memilih perwakilan untuk membuat undang-undang dan kebijakan, itu disebut demokrasi perwakilan. Istilah demokrasi partisipatif mengacu pada sesuatu di

antara keduanya: rakyat memilih pemimpin tetapi juga memainkan peran dalam membentuk kebijakan.

Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, memiliki suara nyata dalam pembuatan aturan dan program yang membentuk pemerintahan. Eksistensi partisipasi politik kontemporer sangat terbantu dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menawarkan budaya demokrasi baru. Kemajuan teknologi informasi berpotensi mendorong warga negara berperan serta dalam wacana dan praksis politik. Teknologi informasi sangat penting dan vital dalam setiap masyarakat. Informasi telah menjadi sumber daya penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) atas kesempatan dan bimbingannya.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.
3. Bapak Puryantoro, S.P., M.P. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNARS yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.

5. Bapak Irwan Yulianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Yogyakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Al-Dalou, R., & Abu-Shanab, E. (2013, May). *E-participation levels and technologies*. In The 6th International Conference on Information Technology (ICIT 2013) (pp. 8-10).
- Aziz, M. S., & Hasna, S. (2020, December). *The Problem of e-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia*. In 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020) (pp. 470-476). Atlantis Press
- Bastien, F., Koop, R., Small, T. A., Giasson, T., & Jansen, H. (2020). *The role of online technologies and digital skills in the political participation of citizens with disabilities*. Journal of Information technology & politics, 17(3), 218-231.
- Lidén, Gunnar & Avdic, Anders. (2003). *Democracy Functions of Information Technology*. 142. 10.1109/HICSS.2003.1174320.
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). *Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Civic Hukum, 6(2).
- Polat, R. K. (2005). *The Internet and political participation: Exploring the explanatory links*. European journal of communication, 20(4), 435-459.
- Saebo, O., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). *The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area*. Government Information Quarterly, 25(3), 400-428.
- Uhlener, C. J. (2001). Political participation. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 11078, 11082.
- Sanford, C., & Rose, J. (2007). *Characterizing eparticipation*. International Journal of Information Management, 27(6), 406-421.).
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi*. Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021, 1(1), 1090-1098.
- Yusri, A., Pane, R. P., & Vadilah, N. (2021). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kelurahan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 10326-10330.